

PERATURAN DAERAH PERATURAH BUPATI NOMOR 3 NOMOR 15 TAHUN 2011 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR: 3 TAHUN 2011

TENTANG

PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- salah merupakan daerah a. bahwa pajak Menimbang: pendapatan daerah yang sangat penting sumber potensial untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan masyarakat dengan sesuai serta peran kemampuannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2)
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
 Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten
 secara atribusi berwenang untuk memungut pajak atas
 jenis Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame.....

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Pajak Reklame, Pajak Batuan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686

Sebagaimana.....

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik dangan Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik sizenoon) Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang-undang.....

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Managara Republik Indonesia Nomor 4575); Managara Republik Indonesia Nomor 4575); Managara Republik Indonesia Nomor

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Sisenobal Mahagan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Sisenobal Mahagan Mahagan Mahadan Mahagan Mahadan Mahadan Mahagan Mahadan Mahad

Nomor 4457);

2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun nautaasi dalaba 2009 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan pney daysiw as danes Belanja w Daerah o Kabupaten Luwu Tahun neb nedelineme Anggaran 2010 nem neb nutepnem prenewted kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dakam system Negara Kesatuan

4 Dewan Per vakitamasana naujuteana nagnad nya disingkat DPRD,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU, penyelenggara Pemerintahan Dargah.

Bupati adalah Bupati Luwu Pejabat acalah pegawaUWUJJTAQUB tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuaintakautumaman perundang-undangan. Pajak Daerah, yang selamutnya disellut Pajak, adalah kontribusi

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HOTEL, natural PAJAK PRESTORAN, PAJAK PHIBURAN, PAJAK neb pauspris REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK Symbological Bukan LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG

3. Badun adarah sekumpulan orang dTAJAW DNURUG merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perselinakerbatas, perserban komanditer. perservan lainnya, biMUMU NAUTNATAN ara (BUMN), atau badan usaka milik daerah (BUMD)LlasaSı nama dan dalam bentuk apa

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Hotel.....

2. Pemerintah.....

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

unsur penyelenggara Pelilen unsur penyelenggara Pelilen unsur penyelenggara Pelilen selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan negarah otonom, selanjutnya mempunyai batas-batas wilayah

3. Daerah otonom, selangan mempunyai batas-batas wilayah yang masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang masyarakat hukum yang mengurus urusan pemerintahan masyarakat nukum yang mengurus urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa kepentingan masyarakat dakam system Negara Kesatuan berdasarkan aspirasi masyarakat dakam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Republik Indonesia.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah dembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Luwu.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang/Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan MAldigunakan untuka keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya PARKIR, PAJAK AIR TANAH, Itayar narumakmus

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. otonomi seluas-luasnya d'aiam sistem dan prinsip Negara Kutahan

Republik Indonesia sebajaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

10. Hotel.....

10. Hotels adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran.

12. Restorang adalah fasilitasu penyedian makanang dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, gikantin, siwarung, barin dan sejenisnya termasuk jasa dan boga/catering asy data pupunan nab data protesta dan sejenisnya sejenisnya kafeg

13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, petunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

15. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

16 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- 18 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 19 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

20. Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara systema dan/atau penghitungan penghitungan penghitungan penghitungan penghitungan penghituak penghitungan penghituak penghitungan penghituak penghitungan penghituak penghitungan penghituak p

21. Pajak di Air Tanahat adalah a pajak katas ke pengambilan dan/atau pengan kelentuan perunahatanah berunahatan pengambilan dan/atau

22. Air tanah.....

daerah.

22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 22. Air Tanan adalaman yang tarahan syang tarah syang

22. All di bawah permukaan tanan.
23. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
23. Pajak Sarang Burung walet.

23. Pajak Salang Salang burung walet. 24. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 24. Burung Walet adalah satwa collocalia maxina, collocalia esculant

Burung Walet adalah satus panga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia lincni. 25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan

25. Subjek Pajak audian ording mencakup juga dapat dikena na pajak. Com sput qualanda ne na pajak. Com sput pajak. 26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar wajib Pajak addidi dan pemungut pajak, yang mempunyai hak pajak, periotong pajakan sesuai dengan ketentuan peraturan ne perundang-undangan perpajakan daerah sum s

27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender basas sasas a sagara

29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau daalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan cengambile a mineral bukan logam dan batu**harabh nakajagrag** bet

30. Pemungutan adalah suatu Erangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib

Pajak serta pengawasan penyetorannya. na kali azih pray nugue 31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesual dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 22. Air (5118h

32. Surat Setoran.....

32. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, diadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah

pokok pajak yang terutang.

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah besarnya pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratife, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- 36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 - 38. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

c. Pajak hikuran..

40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 40. Surat Keputusan Keberatan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SKPDLB, SKPDLB, atau pemungutan oleh pihak ketica terhadap speri skro, stau pemungutan oleh pihak ketiga yang terhadap pemotongan ratau pemungutan oleh pihak ketiga yang ternadap periode garakter ternadap periode garakter ternadap periode kajakter ternadap periode k diajukan oleh Wajib pajaka 41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding

41. Putusan Banding adalah Patasan Keberatan yang diajukan oleh Wajib

Pajak.

Pajak.

42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 42. Pembukuan adalah secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang teratur untuk menganyang penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

43. Pemeriksaan adalahus serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektife dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban seperpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

44. Penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakuka olh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 38 Suret Taginan Pajak Daerah, yang selanjutnya.seynskenstreD,

acalah surat untuk mela II BAB tagihan pajak dan/atau sanksi

commistratif berupa bunga dan/atau denda JENIS PAJAK KABUPATEN GRUTUSEN

nembetulkan keselahan tulis, keselahan hitung, dan/atau kekeliruan alan ren rapan ketentua 2 lasa nu dalam peraturan pertindang

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 9 (sembilan) Jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri atas :

b. Pajak Restoran;

c. Pajak hiburan.....

Pampetulan, atau Surat Keputusan Keberacan.

- o. jasa sewa apartemen, kondomonium, dan seje;inanudiH yaja c.
- d. Pajak Reklame; silipibnen tesun ib leggnit tempet ezet .
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; pendi dagmat baga berakir;

- h. Pajak Air Tanah; dan usts nenslang orid
- Pajak Sarang Burung Walet. Lagab pnay letoH nakaraganalesib

Bagian Kesatu Botel Asign Asigna (1) Pajak Hotel nereyaran nesakukar pribad atau 8adan yang lg pribadi atau Badan yang

(2) Wajib Pajak Hotel adalal Paragraf pribadi atau Badan yang Nama, Objek dan Subjek Pajak

P3531 5

Desar Pengenaan, Tari 8 lasa9 a Penghit propries Pengh Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas kegiatan pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran. Dasar pengenaan Pajak Hotel adaun junish pendayaran atau yang

seharusnya dibayar kepada Holel 4 Isasq

- (1) Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan;
- (2) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksimail, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
- (3) Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat 1610124 A 1/15/L (1) adalah:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

b. Jasa Sewa.....

mengusahakan Hotel.

b. jasa sewa apartemen, kondomonium, dan sejenisnya;

b. jasa sewa apartemen, kontrologia di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti asuban dan panti social lainnya yang sejenis. jasa tempat tinggai din panti social lainnya yang sejenis; panti jompo, panti asuhan dan panti social lainnya yang sejenis; dan

e. jasa biro jasa biro perjuisi. Yar diselenggarakan Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum,

Pasal 5

(1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang Mengusahakan Hotel. Hajak Pajak Objek dan Subjek Pajak

b. 2358 Sew

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak ar nama Tajak Hotel dibungut pajak utas kegiatan pelayanan yang

feet stan del Hotel dengan penolassequi. Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. 15259 1 Obyek Pajik Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

ten rasult i silitas olah ra ja da 8 lasar 1917. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

I) Tek termasuk obyek Pajabubayansigsalajamana dimaksuo pada ayat

Pemerintah atau Pementuan parakan oleh a. jasa sempat tiinggal Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 9.....

delabe (1)

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas kegiatan palayanan yang disediakan oleh Restoran.

> Paraoraf 1 Nama, Oby 01 losed byek Pajak

- (1) Obyek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran;
- (2) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 91 6269

(1) Doyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan Pasal 11

- (1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran; nanofoci .6
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang c. Fonteks kecantikan, binaraga, dan se.narotsan nasahasugnam d. pameran;

e. ciskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

f. sinkus, acrobat, dan sula 2 largarage

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak sa p

h. pacuan kuda, kendaraan berniotor, dan permainan ketangkasan; i. panti pijat, refleksi, m2hdasaSip/:pa, dan pusat kebugaran

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran io napribasting i

Pasal 13

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). menikmati Hiburan;

(2) Wajib Pajak Hiburan adat hasaqng pribadi atau Badan yang

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2.....

Bagian Ketiga.....

dipunquit bayaran.

Bagian Ketiga nama Pajak Restoran. Pajak Hiburan Grozen Majar kegiatan parayanan

erestalan oleh Restoran. Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak es Palais, Restoran adalah palayanan yang disepiakan oleh

Pasal 15

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas kegiatan penyelenggaraan Hiburan. and dear arest telep pembell, back disconsumer di tentral prevener

Pasal 16 .nisl tog not to aug gr

- (1) Obyek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan Pass 11 dipungut bayaran;
- (2) Obyek Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : nomboli in chandata dan/atau minuman cari Pes (mlit nanotnot .s
- b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, acrobat, dan sulap; 10106169
 - g. parmainan bilyar, golf, dan boling; is Tingsnagnag seed
 - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran See pergeraan Pajak Resionan adalah nabi;(natnas ssantit) yang
 - i. pertandingan olahraga Resagarhalo nagnibnaring i

Pasal 17 (1) Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang

(2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang negot pokok Pajak Restoran yang insulati acad dasar

Thengal kan tarif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dasar Dergons residentarif sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12. der genaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Ketiga.....

Paragraf 2.....

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

and ayat (1) meliputi:

Obyek Pajak sebagaimani

phyos amelyst a

seienis la nova;

Daerain.

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan;

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan. i reklame udara:

Pasal 19

- (1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Khusus Hiburan berupa pagelaran busana, konteks kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, shadan mandi uap/spa, tarifi Pajak Hiburan dapat ditetapkan sebesar 75% (tujuhipuluh lima persen); ethaw in supporting ethate in share in
- (3) Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) apabila dikomersialkan.

Pasal 20
Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana d. reklame yang diselenggarakan oleh Perner Kan galab buayamib

Bagian Keempat Pajak Reklame

(I) Subyek Pajak Reklame ada'ah orang pribadi atau Badan yang Palagraf. I Pargara

menggunakan Reklame; Nama, Obyek dan Subyek Pajak

menyelenggrakan Reklame 12 lase

Dengan Pajak Reklame dipungut pajak atas kegiatan penyelenggaraan Reklame.

Pasal 22.....

(2) Wallb Pajak

(4). Dalam Hal......

atau Badan yanc

atau Badan tersebut:

- (1) Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame; (1) Obyek Pajak Kendinana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Obyek Pajak sebagai india :

 obyek Pajak sebagai india :

 a. reklame papan/billboard/vidiotron/megatron dan sejenisnya;

P 1 1526 9

- reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara; se resear as; analysm of units
 - i. reklame film/slide; dan
- ne j. reklame peragaan. 625 d. narelegad aquired namely
- (3) Tidak termasuk sebagai obyek Pajak Reklame adalah :
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televise, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk byang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya:
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut: der gan dasar pa S
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Bagian Keempat
 - Pasal 2369
- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggrakan Reklame; 15 1389
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang prihadi atau Pada prihadi orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut; 98581 22

(4). Dalam Hal.....

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 24

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame;

(2) Reklame diselenggarakan oleh Pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame:

(3) Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame;

(4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

Perper ntsh Daeroh; ■ SZIA (egroateremoat varus on structure on structure of SIA)

(6) Hasil perhitungaan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

penggunaan tenaga li25 lasaqing dihasilkan sendiri dengan

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

d renggunaan tenaga listrik 365 leżeś Isus digunakan untuk tempat

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6).

Bagian	Kelima	•
--------	--------	---

Isrliq Spites keried uleism Bagian Kelima Balan ketiga spitak Penerangan Jalan manusanan ketiga palak penerangan ketiga palak penerangan ketiga palak penerangan ketiga palak penerangan palak penerangan ketiga palak penerangan palak penerangan ketiga palak penerangan palak penerangan palak penerangan palak penerangan palak penerangan Pajak Penerangan Jalan

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 27

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas kegiatan Dengan nama Pajak listrik, balk yang dihasilkan sendiri maupun yang penggunaan tenaga listrik, balk yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

g) Reliame disclenggarakan ses lasar Rekem sebegaimana

- (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain;
- Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik;
- Dikecualikan dari obyek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
 - c. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan (nec kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi terkait; dan
- d.penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat Beserai pokok Pajak Reklame yang terutang cihitunghabadian cara
- mescallan tarif sebagaimana (esplasaf) dalam Pasal 25 dangan dasar (1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik;

Bagian Kelima.....

(2). Wajib Pajak.....

Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan (2) yang menggunakan tenaga listrik;

Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak (3)

Penerangan Jalan adalah penyedia listrik.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pajak Mineral Bullan Logan, dan Butuan Pasal 30

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual (1) Nama, Chjek dan Subjek Pajak ; kirtzi speneT

Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)

Pasal 33

ditetapkan:

n. Kalsit.

- As scatudalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan pemakaian beban/tetap ditambah dengan biaya biaya kWh/variable yang ditagihkan dalam rekening listrik.;
- nedsiba dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Luwu.

Pasal 31

d. batu kapur; Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (1)Tarif Pajak (sepuluh persen); f. baiu permata:

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, (2) pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan

Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak (3) Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma Penerangan lima persen); l. granity andesit.

Pasal 32.....

m. dips;

dimaksud dalam Pasa

c. batu setengah permata;

nebell ueta stedho unevo reli Pasal 320 negneranan ke se Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan Besaran pokok Pajak Penerangan Besaran pokok Pajak Penerangan dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), cara mengalikan tani sebagain dasar pengenaan pajak sebagaimana ayat (2), dan ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 78 700131 2

stated negatifrights Bagian Keenam insensoned lead Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

tell telly death nelst negparagraf 1 lines need need need Nama, Objek dan Subjek Pajak with just cenaga listinic subadaimana dimeksud pada avat (1)

Pasal 33

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. playa Deban/tetap ditan hah dengan biaya per incaar

- with warrable yang ditag*Eklassquarn rekening listrik.; (1) Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :
- renggunaan listrik, jangka waktu pemakalan list **sadas**n.sanga
 - sat iar listrik yang berlaku di wilayah Kabupatealut uted .d
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur; Pasal 31
- Talf Pajak Fenerangan Jalan ditetapkagnuqa utad .a 10%
 - f. batu permata;
- Penggunaan tenaga listrik dari sumber lau;tinotnadice ustri,
- pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Patimolobud ngan
- Jalan diterapkan sebesar 3% (tiga persen);
- (3) Penggunaan tenaga listrik yang dit;(etillah) utadimaran tenaga listrik yang dit;(etillah) utadimaran tenaga listrik yang dit;
- Penerangan Jalan ditetapkan sel esar 1,5% (filarg .koma lima person);
 - m. gips;

n. Kalsit.....

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan**;tialak**an**n**yang merupakan ilutan cari kegiatan pertambangan ;nilosa,o,ang p. leusit; tidak dimanfaatkan secara komersial, dan q. magnesit; r. mika; Pasal 35 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ramgem . Arang or badi atau Badan yang dapat mengambil Minaral (Jardin Lagam u. opsidien; dan Bahuan; Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan adalah orang; nakoady atau (2) Badan yang mengambil Mineral Bukan Logalikingk neb nizeq .w x. pasir kuarsa; y. perlit; Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungarisagond .s aa. talk; bb. tanah serap (fullers earth); 15269 (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logiamotsibideneth.22 alah Nilai Jual Hasil Fengambilan Mineral Bukan Logar; teilinkanat.bb; Ni ai jual sebagaimana dimaksud pada ayat; (mula) zawat .99ngan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan den ja; zarti aft pasa atau harga standar masing masing jenis Mineral lizons, pengam hh.zeolit; dan Baruan; (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ada ; lasad qdiratarate vang bedeku di lokasi setempat di winsbritikang kk. mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan (2) Dikecualikan dari obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Bukan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman Tarif Pajak Mineral Buka sag/nia aqiq namananan pipa air/gas; Akus IsrariM Abisq hinst dua puluh lima persen).

P2531 38

b. Kegiatan.....

b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Butuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial; dan

Pasal 35

(1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan adalah orang Pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 36has earlb?) dates danah da

 Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasa atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;

(3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga ratarata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan;

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

b. Kegiatan.....

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Bagian Ketujuh Pajak Parkir

Paragraf 1 Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 39

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas kegiatan penyelenggaraan tempat Parkir.

Pasal 40

- Obyek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
- (2) Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk kaaryawannya sendiri;
 - penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir rumah ibadah.

Pasal 41.....

(1) Subjek Pajak Parkir adalah pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor; parkir kendaraan bermotor, Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

(2) menyelenggaraakan tempat Parkir.

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 42

(1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir;

Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Bagian Kedelapan Pajak Air Tanah

Paragraf 1 Nama, Objek dan Subjek Pajak

Dengan nama Pajak Air Tanah Pasal 45 pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. dipungut pajak atas kegiatan

Pasal 46.....

(4) Besarrya Nilai Perolehan 184 Isasan sebagai mana dimaksud pada

(1) Obyek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah:

(2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

Besard policy of least mout Pasal 47 Tana Variang denigan design design and design des (1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- Nilai perolehan Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2)dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalaginis radmus zinatjas/atau

 - b. lokasi sumber air;
- pengusahaan Sarang Burung Walet. (1) c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat; (3)

-	
(4).	Besarnya
('/'	

(4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

bualemib enemiepedes densit Pasal 4969 xeido neb nedebue di

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). k report an datar rumah tangga, pengciran pertanan

Pasal 50 stras , feyr at monulined red

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

while Palak Air Tanah adalah crang pribadi atau Badan yang nsneT via nisteri Bagian Kesembilan lidm sprac nestudelim Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1 a Penghit Incan Pajak Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 51

Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. dinyalakan dalam rupiah yang dibitung dengan mamperumbangka

- sepaggan statu seluruh fakto27 lazan be ikut : Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau (1)pengusahaan Sarang Burung Walet. (2)
- Tidak termasuk obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d. voume air yang diambil dan/atau cimenfaatkan;
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPN);
- b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan esualkan dengan kon i si iing kurgar setempati igolonyat

(4). Besamya.....

- (1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan belaw Sarang Burung Walet;

waj to pajak untuk mengh Paragraf Payaton, dan melapotkan pajak Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Pasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 54

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet; Abdo Harang Walet 2616 (2616 (2616 (2616)))
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet. Trasnuggnag asia narayadnag sala narayadnag sala

Pasal 55

Tarifi rePajak ris Sarangama Burung ganwaletan ditetapkan redasebesar 10% (sepuluh persen).

A pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaaban Air Tanah;

Pasal 56

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

PEMUIII BAB PAJAK

WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK

Pasal 59	Pasal 57

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Luwu tempat (1) Pajak yang terutang dipungan, penerangan jalan, mineral bukan hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan batuan parkir, air tanah, dan sarang burungan hotel, restoran, nibulan, sarang burung burung walet natiberlokasi; den prem delebe telsW granud unare -

(2) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghilungnaturat pnay

Pasal 58

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat: nsenapnag nsag /

- b. pembayaran atas pelayanan Restoran; unu grane sul sik
- c. pembayaran atas jasa penyelenggaraan Hiburan;
- d. pembayaran atas penyelenggaraan Reklame; E posta a muni
- e. pembayaran atas penggunaan Tenaga/Listrik; a paesia simulov
- f. pembayaran atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan: Pasal 53
- g. pembayaran atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan
- h. pembayaran atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; Pasal 56
- in pembayaran atasy pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang dengan cara mangarikan terif sebagaimana dimuksutalaWignuruBi 55

Jangan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal S4.

BAB IV PEMUNGUTAN PAJAK

WILLAYAH PEMUNGUTUTESAN NAIGABAJAK DAN SAAT PAJAK Tata Cara Pemungutan

Pasal 57.....

Pasal 59.....

f. Pajak Parkir;

(1)Pemungutan Pajak dilarang diborongkan; was pasted dollarang

Setlap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang (2)berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh perundang-undangan Pajak berdasarkan peraturan Wajib EALIDU perpajakan;

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan (3) penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau lain,

dokumen lain yang dipersamakan;

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada (4)

ayat (3) berupa karcis dan/atau nota perhitungan;

Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT;

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dokumen penjualan yang telah diperforasi oleh Pejabat yang

berwenang;

sama besarnya

(7) Ketentuan tentang tata cara perforasi diatur lebih lanjut dengan pajak yang terutang sama be c. SOPN lika jumlah

dengan jumlah kredit pagak sasah pajak tidak terutang dan tidak

- (1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (2), terdiri atas: a. Pajak Reklame; Junud (1) hunul (1) terum alas : sebagaimana dimeksuu pada ayat (1) hunul (1) alas : sebagaimana dimeksuu pada ayat (1) hunul (1) hunul alas : sebagaimana dimeksuu pada (1) hunul (1) hunul alas : sebagaimana dimeksuu pada (1) hunul (1) hu

(2) Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak sebagaimana teriambet dipayar untuk dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : empau) bulan dihitung sejak saat terutalignya palision kajang a

(4) . Kenaikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui; narudiH Najan Sanksi

administratif berupa kenaikan sebesahalan Jalan sebesahan kenaikan sebesahan Jalan Sebesahan kenaikan kenaikan sebesahan Jalan Sebesahan kenaikan k

e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;

f. Pajak Parkir.....

Pasal 59 f. Pajak Parkir;

f. Pajak Parkii,
g. Pajak Sarang Burung Walet.odib prierelib sicis 9 netupnumay Gendre Avajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang

pardasar van surat kete 16 lasa jak atau dibayar sendiri olah

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal:

1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

pnsy terutang dihitung secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak

Learkit

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka

2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;

(4) . Kenaikan.....

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika pada Wajiba Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

penyetoran palak yang ten 26 lasaq ing lama 1 (satu) bulan setelah

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bupati atas permononan kedua nanonomini persyaratan

yang ditentukan dapat memberi an perserujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur akiga nahipa taruZabayaran pajak, dengan

dikenakan bunga sebesar 2'66(lasaq)erseratus) sebulan;

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika: nem tujnal nidel nautnetek (4)
- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; sel neg
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga prev dan/atau denda. da sasa da kas da kas da sanksi administratif berupa bunga (1)
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

..... CPX (2). Jika Pembayaran....

Wenalkan sobagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika (3) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi dibayar setelah jatuh bugadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan iderdan ditagih melalui STPD ib (E 640ns 6 hunud (1) 1646 thea paula kenaikan sebesar palah lima perseratus) dari pokak pajak ditambah sanksi au mistratif berupa bunga sebesar nadipang nab-nasyadmod crop change.

terlambet dibeyar untuk jangka wak'u paling lama 24 (dua puluh empat) but in dihitung sejak 6, lasa9 utangnya pajak.

tanggal jatuh tempo pembayaran dan menentukan (1) Bupati penyetoran pajak yang terutang paling lama 1 (satu) bulan setelah saat terutangnya pajak; musiob utau dayan syngnaturat tasakan.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Dan Ju Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

(3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, jatuh tempo pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan nerepenundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

sebagai akibat salah tulis dan, atau salah hitung; c. Majib Fajak dikenakan 26 dasa administratif barupa bunga (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang Granditunjuk oleh bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT san si administratif berupa bunga sehesar 2% (d.QqTZ-usts.us) setiup bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat

(3). SKPD.....

(2). Jika Pembayaran.....

terutangnya pajak.

- (2) Jika pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, so hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah paling lama Jump and pada avat (1), ayat (2), ayat (3), dan .maj PS x lidak
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan. ditu ju- etau tanda pen jiriman surat keperatan melalui surat pos

tercarat schagai tenda bix d 60 lasaPiaan surat keberatan.

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Nep itusan atas kaberatan sebaga**nbun-gnabnurag narutarag** (1) dap it kerupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

mer ambah besamya pajak ya akangrutang;

delat (1) teve abag KEBERATAN DAN BANDING BARTS BIC'SQA (E lewet dan Bepati tidak memben suatu keputusan, keberatan yang

ne Pasal 67 9 segnat Junea et nasu (aib

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Pasal 69 atas suatu:
- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan bar; GANA anya
- kepada Pengadilan Pajak terhadap keputus; BADAN adenai
 - keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati; ;ttsquan oleh Bupati;

Pasal 70.....

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksugnaba; BLICHNR (1)
- teruli dalam banasa Indon. MOANS sanan
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas; analio antende desuturan
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) nad bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ispo kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5). Keberatan.....

สาธาระ กระโบาร์โอ

2) Jika pombayaran pajak dilakukan ditempat lain yang dipunjuk, (5) Keberatan syang 6 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana (5) Keberatan syang 6 tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dimaksud pada dyar (7) tidak nab dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan. (1) Pajak yang terutang berdasarkar SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKI DKET,

Pasal 68

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau

menambah besarnya pajak yang terutang;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati

Pasal 69

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya TUTSLE SAIR Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuli dalam bahasa Indonesia, dengan nson alasan nyang sjelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiris salinan dari surat keputusan

Keberatan harus diajukan dalam jangka wetuderah nataradak (bga) (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding 6569 keada keada kebil

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak;

(5), Keperatan....

Pasal 70.....

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan;

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak

bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB; salud

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan;

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh perseratus)

izit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan;

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 71

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

(2). Bupati dapat.....

ne b.mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

nsa c. mengurangkan atau membatalkan STPD; a sanda luku e mili

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan emeg makujapan kaja ditentukan; dan emeg makujapan kaja ditentukan.

pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembetulan, Pembatakiny BAButar gan Keterapan, dan

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 72

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati; O Na nasilwannan

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran keputusan;

(2). Bupati dapat

(3). Apabila.....

perpajakan daerah;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 6 dan 6 Bupati b tidak 1 memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 da ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak cenganalud (utas) inya

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak atau utang lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bue langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang ned Pajak tersebut; pred rish indate dib tageb d furud (1) tava a bad

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pas kelebihan pembayaran Pajak, Hasudi de Kanasari en de si

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PAJAK

DAN PEMBEBASAN PAJAK Pasal 73

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di memberikan pe bidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pe**:sjidaqa;huggnatrat**anan

Tutsa. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau eg neb

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(3). Dalam Hal......

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya mehyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya (1) kepada Pemerintah Daerah; nodoa dag 9 ne nyadulu pin

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan pada a at (1) ditibukan dalam jangka waktu Asig dijaW halo da) bulan sejak diterbiskannya SKPDLB atau SKPDLB;

(6) Jika nengembalian keleb PS-lasaPbaya an Pajak dilakukan setelah (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang

sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

(1) Dengan alasan tertentu Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan (2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan pengurangan dan
(1) Jord Buch Buch Gusmienes as slote 7
(2) Persyaratan costs to the property of the p
(2) Persyaratan serta tata cara pemberian pengurangan, keringanan
dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Poratura Di langua pada ayat (1) diatur
pour lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. grasiu naudagneg aba d
Transment of the party of the p

maupun tidak langsund. (3), Dalam Hal.....

BAB IX.....

BAB IX PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

- Pasal 76
 (1) Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negen sight terranturan bupati.it umamed ligis negen is ve gen vang manakat oleh pejabat yang perwenang sesuai dengan

sebarc 11 lava sted bus lam Pasal 77 (1) Bupati melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib : (26/9) nab qakipna ibanam

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran nskeje pemeriksaan; dan/atau Aspril rispred napruguras nabud

c. memberikan keterangan yang diperlukan. di memeriksa buku-buku, catatan cataran dari dokumen-dokumen

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dengan Peraturan Bupati.

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas neny dix and indek pidana di bidang perpajakan daerah tersebut)

BAB X

PEMBUKANIDIYANGHERIKSAAN

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Pasal 78 Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di di perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; dijew sakingdi, pusy kejeg disav (s meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai

gnay orang pribadi patau badan tentang kebenaran perbuatan dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah

neons tersebut; egma iduzement dunou netsoma ad nexisadora n.d. neus.c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

daerah tersebut; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut; dengan Peraturan Bupati.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;

g. Menyuruh.....

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di

nel (bidang perpajakan daerah tersebut; nib enan isus daerah tersebut;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

j. dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

k. menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum pajak dapat cipidana dengan pidana kurungan palinghapi (uga) (uga) bulan atau denda paling ban IX BAB 50.000.000,00 (lima puluh juta

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

(1) Setiap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan ricor SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling neurbanyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau ayat (2) dan/atau tidak membantu ke.rsysdib.gnsruksaan

-(2) Setiap Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

Merugikan.....

merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. 1 660 gal construction

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran, bi natio hed prior prior granges

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 81 merupakan penerimaan negara inu che lu lu phamem. I . dun diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

k. menghertikan cenyidikar 08 lasaP

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. da ing nautnerak (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membaituhukan

dimulainya penyidikan dan 18 lasan paikan hasil penyidikan kepada

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan yang tidak melakukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). METENTIAN FLOAMA

Pasal 82

Wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dapat dipidana sesuai dengan Eperaturan perundang-undangan spasiasis nashiqmalam ustaynab merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (si**88)lasa9**in dan/atau pidana denda paling Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana sesuai dengan peraturan perundang-SPTPD atau mengisi dengan bilak benar dan/atau danaphinp dan, atzu melampi kan kecerangan yang tidak benar sehingga

dipidana dengan pidana merucikan kenangan daripuram

ETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

3) Fin all pidges sebagaimens up it sud (ada ayat (1) dan ayat (2)

Pajak yang masih terutang berdasarkan jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini masih tetap ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak pajak terutang.

KETENTUAN PENUTUP J. J. Astrop & graphsturing

Pasal 85

setian orang cribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburah yang

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pajak Hotel;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 28 Tahun 2002 tentang Paiak Restoran;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 1998 tentang

b pajak Hiburan; neukukan pembukuan ;narudiH kajaR .an

d Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 1998 tentang aturan perundang-undangan. Pajak Reklame;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 1998 tentang

Pajak Penerangan Jalan; 88 15264

f. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 1998 tentang Regardian Bahan Galian Golongan C; (S) 1545 57 16269 pn dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi bigib trosb ayng shahat undangan.

Pasal 86.....

muntur schedin meter

BAB XII.....

ends paling ber yak 4

dulam Pasal 79 tidak dapat

5 (lima) tahun sejak saat

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

> Ditetapkan di Belopa pada tanggal 10 Maret 2011

> > BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa pada tanggal 10 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 3

Dan jone pagek ters NASAJEKNES Palak Daerah Dan Gengan Undang-Tahun 20 SATA NE PEJAK Daerah Dan Rethbus

-dp-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU gromes ICI . MEUJES NOMOR | 3 | TAHUN 2011 using Norman 28 Tahun 2009 tersebut juga

ABALIXADE DAGY HEIDLE HELE TENTANG

basis palak yang sudah ada. Hal lainnya adalah PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, PAJAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANAH, DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET yang sanget besar trensdap dana perimbangan dari

1. PENJELASAN UMUM identalinkan akuntani MUMU NASAJEKNEY.1 Percentah Daerah tidak terderong untuk mengalokas

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil Judinga basis-pasis pajak dari ber pajak daerah.

Pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, baik Kabupaten maupun Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;;
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- Pajak Sarang Burung Walet;
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis.....

P353 4

Cukup telas

Cukup jelas

Ayat (1)

18va (3) 18va

Dari jenis pajak tersebut yang membedakan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah sebutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C berubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan. Di samping itu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, juga menekankan adanya perluasan basis pajak Daerah yang dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada. Hal lainnya adalah mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru.

BERLAME, PARKI PENERANGAN IALAM, PUDAK MINERALIAKAN Pertimbangan perluasan basis pajak dan penambahan jenis pajak baru seiring dengan pertimbangan bahwa ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Diintrodusir Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran be secara efisien dan masyarakat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan pajak (termasuk retribusi). Demikian itu pertimbangannya, di sisi lain bagi Daerah Kabupaten Luwu menjadi tantangan untuk menggali potensi pajak secara intensif, mengingat basis-basis pajak dari berbagai jenis pajak masih terbatas. Pajak daerah yang menjadi kewenangan

baik Kabupaten maupun Kota berdasarkan U<u>ndang-Uncang</u> Nomor 28

Dari jenis.....

```
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribasan IMAD LASAN III
  Pasal 1
                                                 a. Pejak Hotel;
       Cukup jelas
                                             Pajak Restoran;
 Pasal 2
                                              c. Parak Hiburan;
      Cukup jelas
                                              d. Pajak Reklame;
 Pasal 3
                                    Pajak Penerangan Jaian;;
                      Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
      Cukup jelas
 Pasal 4
                                                g. Pajak Parkiri
      Ayat (1)
                                            h. Pajak Air Tanah;
          Cukup jelas
                                 Pajak Sarang Burung Walet;
      Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkot(2) tayA
          Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangasiat quhuD
```

Ayat (3).....

-47-	
Ayat (3)	
Huruf a	Ct least
Cukup jelas	Pasal 12 Cukup jelas
Huruf b	Cit leaves
Pengecualian apartem	en kondominium den
sejenisnya didasarkan ata	as izin usahanya. Di Isaaci
Turur C	Cukup jelas
Cukup jelas	Pasal 15
Huruf d	Cuxup jolus
Cukup jelas	Pasal 10
Huruf e	(1) 1EVA
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 5	Ayat (2)
Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Pasal L7
Ayat (2)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 6	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 7	Pasal 18
Cukup jelas	Ayat (1)
Pasal 8	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Pasal 9	Cukup jelas
Cukup jelas	Pasal 19
Pasal 10	Ayat (1)
Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayət (2)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (3)
dengan "hiburan nerupatt lasequan	Yang dimaksud
Isnois bs Ayat, (1) Isnois negus of Inspired in Inspir	rakyat/radisjonal"
TOTAL COLOR TOLOR TO THE SERVICE OF	Vang dipandang ne
hearing grade Cukup jelas isteelib kutnu uhi	now townst it
dapat dkunjungi oleh (2) taya lapsan	masyarakat.
Cukup jelas	Pasal 12
Pasal 70	

	-48- (E) 15yA	
	6 tutuH	
Pasal 12	Cukun jelas	
Cukup jelas	Huruf b	
Pasal 13		
Pasal 13 nab Cukup jelas nisi aato	116q5 Helianov Pro	
Pasal 14.5 Pasal 14.5 Pasal 14.5 Pasal 14.5 Pasal 14.5 Pasal Pasal 14.5 Pasal	Huruf c	
Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 15	Huruf d	
Cukup jelas		
Pasal 16	Cukup jelas Huruf e	
Ayat (1)		
Cukup jelas	Pasal 5	
Ayat (2)	Ayat (1)	
Cukup jelas	Cukup jelas	
Pasal 17	Ayat (2)	
Ayat (1)		
Cukup jelas	Cukup jelas Pasal 6	
Ayat (2)		
Cukup jelas	Cukup jelas Pasal 7	
Pasal 18		
Ayat (1)	Cukup jelas	
Cukup jelas	Pasal 8	
Ayat (2)	Cukup jelas	
Cukup jelas	Pasal 9	
Pasal 19	Cukup jelas	
Ayat (1)	Pasal 10	
Cukup jelas	Ayat (1)	
Ayat (2)	Cukup Jelas	
Cukup jelas	Ayat (2)	
Ayat (3)	Cukup jelas	
Yang dimaksud (dengan "hiburan berupal kesenia	an
vana dinandana norti	dalah hiburan kesenian rakyat/tradision	ıal
di tempat yang d	u untuk dilestarikan dan diselenggarak	an
masyarakat.	dapat dikunjungi oleh semua lapisa	an
111aSyarakat.	Cukup jelas	
	Pasal 20	

pasal	20	5 1835 C
	Cakab Jerga	Cay up re-as
pasal	21	P2501.26
	Cilkub Jeiga	Cusan Jee's
pasal i	22	Z BALL
	Ayat (1)	26 9(FL N)
	Cukup jelas	(1) to A
	Ayat (2)	Selen diversi
	Cukup jelas	1 VBL 12
	Ayat (3)	Citago etas
	Cukup jelas	(E) fluy A
Pasal :	23	Cukup jelus
	Ayat (1)	DK 15, 50
	Cukup jelas	(1) te/A
	Ayat (2)	Curup jelos
	Cukup jelas	A Valt (2)
	Ayat (3)	(thirt pelas
	Cukup jelas	A comment
	Ayat (4)	15 1=5 2.5
	Cukup jelas	Ayet (1)
Pasal 2		Cukup jebis
	Ayat (1)	(S. Hey V.
	Cukup jelas	Currup Jelas
	Ayat (2)	
	Cukup jelas	(I) my
	Ayat (3)	Colong policy
	Cukup jelas	
	Ayat (4)	Calup pelas
	Cukup jelas	(C) 169A
,	Ayat (5)	
	Cukup jelas	15-et qu. 4-0
	Ayat (6)	The state of the s
1	Cukup jelas	
	curup jerus	Pasal 25
		The state of the s

	10000 20
Pasal 25	Cikup jeras
Cukup jelas	
Pasal 26	Cikup jelas
Cukup jelas	215250
Pasal 27	(1) 169A
Cukup jelas	Cultup jelas
Pasal 28 Ayat (1)	Ayat (2)
Cukup jelas	Culcup felas
Ayat (2)	Aya1 (3)
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	28 11 23
Cukup jelas	Ayat (1)
Pasal 29	Cukup jelas
Ayat (1)	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (2)	Ayat (3)
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	Ayat (4)
Pasal 30	Cukup jelas
Ayat (1)	4-5 (BC)
Cukup jelas	Ayat (1)
Ayat (2)	Culcup Jelas
Cukup jelas Pasal 31	(S) Avat
Ayat (1)	Cukur jetan
Cukup jelas	Ayat (3)
Ayat (2)	Culcup Jelas
Cukup jelas	Ayat (4)
Ayat (3)	Cultura retro
Pasal 32	(2 toyA
Cukup jelas	Crist de la company
canap jeios	(d) 20y4
	alai quatio

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 33.....

al 23	
Pasal 33 Cukup jelas	14 tags)
LOKOP Jess	(Litsya
Pasal 34 Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
	Cultup jetas
Ayat (2)	² 8531 4.
pasal 35	Ayat (1)
Ayat (1)	Critical jelas
Cukup jelas	(\$1450)
Ayat (2)	CUKUD ICIAS
Cukup jelas	C\$ 1525°
Pasal 36	Culcup jelas
Ayat (1)	PP 1859.
Cukup jelas	(akup jelas
Ayat (2)	F 1566
Cukup jelas	ank (guala)
Ayat (3)	12501 AC
Cukup jelas	(Ly Heye's
Ayat (4)	Cikup Jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Pasal 37	Cukup je as
	· Libert
Cukup jelas	(1:10/4
Pasal 38	
Cukup jelas	25.24 (1.41)
Pasal 39	(S) 10 (A)
Cukup jelas	Cukuo je as
Pasal 40	(# lGen'
Ayat (1)	Fyat (1)
Cukup jelas	Circup jeins
	(Z) BAY
Ayat (2)	my oun 3
Cukup jelas	and the same of th

Pasal 41.....

	25/9(QU-U
Pasal 41	1150 300
Ayat (1) Cukup jelas	Ayat (1)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (3)
Pasal 42	
Avat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup felas
Ayat (2)	Ayat (3)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 43	AL TOS
Cukup jelas	(I) tsyA
Pasal 44	Cukup Jelas
Cukup jelas	Pyar (2)
Pasal 45	Cull op Jelas
Cukup jelas	(E) 164A
Pasal 46	
Ayat (1)	Cukup (elas
Cukup jelas	(A) Thy a
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	
Pasal 47	7 July 3 July 5
Ayat (1)	
Cukup jelas	2849 C. 11
Ayat (2)	
Cukup jelas	
Pasal 48	\$ H3 C.
Ayat (1)	
7 . 7	() 11, y A
Cukup jelas	Curup jelas
Ayat (2)	(§) 469A
Cukup jelas	
	Cukup jetas

Ayat (3)	
Cukup jelas	32 leas
Ayat (4)	Cukup Jelas
Cukup jelas	Pasal 59
** NV 50	Ayat (1)
pasal 49	Curup (elas
Cakab Jeras	(2) Ayat (2)
pasal 50	Cukup jelas
Cukup Jelas	Ayat (3)
pasal 51	Crkup jelas
Cukup jelas	Avat (4)
Pasal 52	Cukup jelas
Ayat (1)	
Cukup jelas	Ayat (5)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	(a) teva
Pasal 53	Cakup je as
Ayat (1)	Ayat (7)
Cukup jelas	Cukup jelas
	Ayat (8)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	ud less
Pasal 54	Ayat (1)
Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Pasal 61
Pasal 55	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 56	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 57	Ayat (3)
N 128 C 1024512	
Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	
Ayat (2)	Pasal 58
Cukup jelas	Pasai 36

	(E) IsvA
Pasal 58	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (4)
Pasal 59	Cukup je as
Ayat (1)	958149
Cukup jelas	Cukup Jelas
Ayat (2)	19551 20
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas	198al 51
read that outside A A	Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas	SSS lesses
Carap Jelas	Ayat (1)
Ayat (5)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Ayat (6)	Cukup te as
Cukup jelas	19891 23
Ayat (7)	Avat (1)
Cukup jelas	Culcup jetas
Ayat (8)	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup Jeses
Pasal 60	
Ayat (1)	Pagal 54
Cukup jelas	Ayat (1) Culcup Je as
Ayat (2)	
Cukup jelas Pasal 61	Ayat (2) C # UC IE as
Ayat (1)	Pasal 55
Cukup jelas Ayat (2)	Culcup prints
	Pasal Sb
Cukup jelas Ayat (3)	Cultur wass
7 7	15 1650
Cukup jelas	(i) 16VA
	petrol direction
	(X) heyA
"N" Bass"	AND TO LOUIS
	Avat (4)

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)	a deum dolac	
Ayack	Cukup jelas	Pasal 66
		Avat (1) Curup jelas
Ayat	(5)	Ayut (2)
	Cukup jelas	Cukup jelas
pasal 62		785al 67
Ayat	(1)	Ayat (1)
	Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat	(2)	Ayat (2)
	Cukup jelas	Cukup jelas
pasal 63		Ayat (3)
Ayat		Cukup jelas
	Cukup jelas	Ayat (4)
Ayat	(2)	Cukup jelas
	Cukup jelas	Ayat (5)
Ayat	: (3)	Cukup jelas
	Cukup jelas	Ayat (6)
Pasal 64	180 185 180 180	Cukup jelas
	t (1)	P3sal 68
	Cukup jelas	Ayar (1)
Ayat	V75 E	Cukup jelas
	Cukup jelas	Ayat (2)
Ayat		Cukup jelas
Ayut	Cukup jelas	Ayat (3)
Avad		Cukup jelas
Ayat	VEV (File control cont	Pesal 69
Docal CE	Cukup jelas	Ayat (1)
Pasal 65		
Ayat	: (1)	Cukup jelas Ayat (2)
	Cukup jelas	
Ayat	t (2)	Cukup jeias
	Cukup jelas	Ayat (3)
Ava	t (3)	Cukup jelas
,	Cukup jelas	
	outup joids	Pasal 66
		Pasal ou

Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3)	Pasal 66	syat (4) Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (5) Ayat (5) Ayat (5) Ayat (5) Ayat (5) A		(2) tour
76 leseq Cukup jelas Cukup jelas (1) 7		
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3)	The company of the co	odsai 62
/ Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)	Ayat (1)	
Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (4) Pasal 65 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3		
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3)		
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3)		
Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (4) Ayat (4) Ayat (4) Ayat (4) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas	421 B. SELDER	
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3)		
Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	■ N. H. W. C.	Ayat (4)
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Ayat (5) Ayat (1) Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas		
Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	Ayat (6)	
Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (4) Pasal 69 Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (2) Ayat (3)	Cukup jelas	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (4) Pasal 69 Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3)		
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Ayat (4) Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 Cukup jelas Ayat (1) Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3)		Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (4) Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (3)	Avat (2)	
Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 65 Pasal 65 Cukup jelas Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas	Cukun ielaa	Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 65 Pasal 65 Ayat (1) Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3)	Ayat (3)	Avat (3)
Ayat (1) Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 Pasal 65 Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (3) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3)	Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Ayat (3)	rasal 69	Ayat (4)
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3)		Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3)	Cukup jelas	Pasal 65
Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3)		Ayat (1)
Cukup jelas Salat (3) Ayat (3)	Avat (3)	
Ayat (3)		Ayat (2)
	Carah Jeigs	
Cukup Jelse		Ayat (3)
	Pasal 56	COUNTY JUNE

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 70.....

pasal 70	(V) 164 V
	estat quar y
Cukup jelas	6×64
Ayat (2)	L) IByA
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	(S. tayA
Cukup jelas	Cukup je as
Ayat (4)	Avat (3)
Cukup jelas	Cukun je as
Ayat (5)	(A) Java
Cukup jelas	Cukun je as
Ayat (6)	Ayat (5)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 71	LT least
Ayat (1)	lyat (1
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (2)	Ayat (2)
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (3)	Ayat (3)
Cukup jelas	Cukup jelas Pasel 75
Pasal 72	
Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cu up jelas
Ayat (2)	Fyat(Z)
Cukup jelas	Pasal 76
Ayat (3)	
Cukup jelas	Ayat (1)
Ayat (4)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Ayat (5)	Pasal 77
Cukup jelas	
Ayat (6)	Nyac (1)
	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (7)
The second second	Ayuc

Ayat (7) Cukup jelas	7 Ayat (1)
50000000000000000000000000000000000000	Cukup jeras
Pasal 73	Ayat (2)
Ayat (1)	Cukup jelas
Cukup jelas	Fyal (3)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (4)
Ayat (3)	Cukup jelas
Cukup jelas	
Ayat (4)	Ayat (5)
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (5)	Eyat (6)
Cukup jelas	Cukup jelas
Pasal 74	73501 7 L
Ayat (1)	Ayat (1)
Cukup jelas	Cukup jelas
Ayat (2)	
Cukup jelas	Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3)	
Cukup jelas	Ayat (3)
Pasal 75	Cukup jelas
Ayat (1)	0asat 72
Cukup jelas	Ayat (1)
Ayat (2)	Cukup jelas
Cukup jelas	Ayat (2)
Pasal 76	Cukup jelas
Ayat (1)	Ayat (3)
1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Cukup jelas
Cukup jelas Ayat (2)	
	Ayat (4)
Cukup jelas Pasal 77	Cukup jelas
	Ayat (5)
Ayat (1)	Cukup je as
Cukup jelas	Ayat (6)
Ayot (7)	Cukup jelas

Ayat (2).....

```
Ayat (2)
          Cukup jelas
    Ayat (3)
          Cukup jelas
pasal 78
     Ayat (1)
                  NOMOR IS TAHUN 2011.
          Cukup jelas
    Ayat (2)
                          EVALVEI
          Cukup jelas
   PELANSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPAT (E) TAYA
          Cukup jelas
     PAJAK RESTOLAN, PAJAK HIBURAN, TAJAK 2 (1) TAYA LAK PENERANGAN JALAN, PAJAK MINESIST QUAND.
                         PAJAR PENERANGAN JALAH, PAJAK
DAN LATURY, PAJAK PARKIR, PAJAK AIR TANGH PER
     Ayat (1) CURUP JEING BURNAR NACAS MAG CURUP Jelas
     DENGAN RAHNAT TUHAN YANG ESA (2) taya
          Cukup jelas
Pasal 80
                       BUPATT LUWU,
     Cukup jelas
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peratura 18 lase9
Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahaslej quau
Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hotel 28 lôzeq
Reklame, Pajak Penerangan Jakaslaj qukuo Minerak
Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, 1884lase9
Tanah dan Pajak Sarang salajuquau Walet
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tah 18 Isang
Nomor 3, Tambahan Lembaran Relectionation
Luwu Nomor 3) tanggal 3 Maret 2011, mc8 lase9
                        segera dilaksanakan;
     Cukup jelas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebia seba sa lasan
dimatisud daism huruf a, makazalej quau3.tapkan
                         dengan Perauran Bupah.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 3
```

Mengingat